

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI
KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARO

SKRIPSI

OLEH

ZEFANIA MANGIRING SILAEN
158330117



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

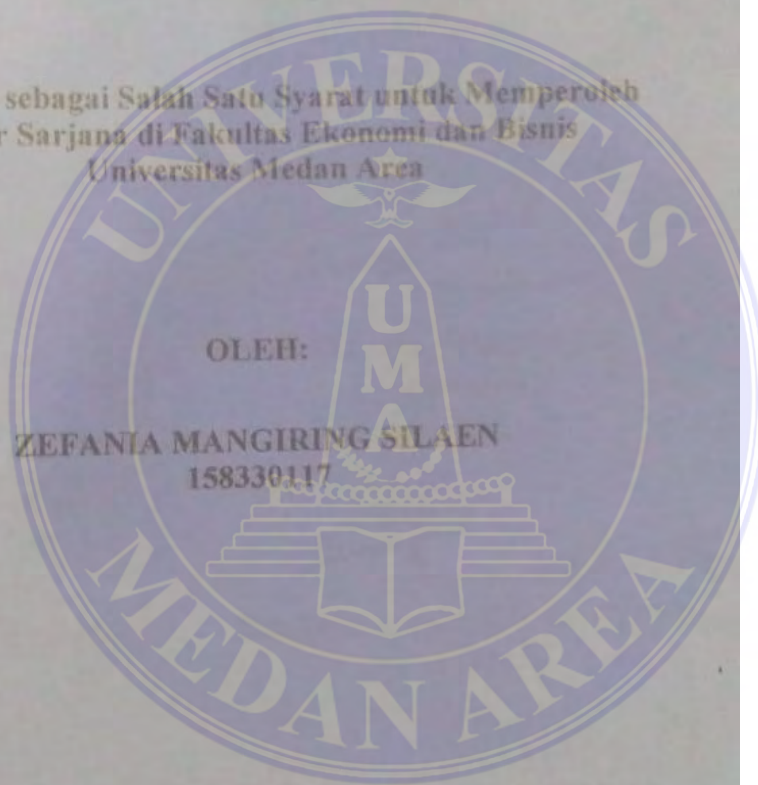
Document Accepted 10/30/19

(Access From repository.uma.ac.id)

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI
KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



OLEH:

**ZEFANIA MANGIRING SILAEN
158330117**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

(Access From repository.uma.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN

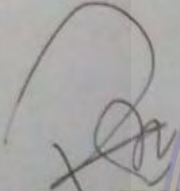
Judul Skripsi Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Karo

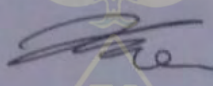
Nama Mahasiswa : ZEFANIA MANGIRING SILAEN


NPM : 158330117

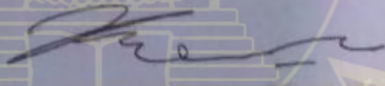
Jurusan : Akuntansi

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Linda Lores, SE, M.Si
Pembimbing I


Ilham Ramadhan Nasution, SE, Akuntansi
Pembimbing


Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE, Akuntansi
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 27 September 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya dari orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah. Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dari sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Oktober 2019



UNIVERSITAS MEDAN AREA

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/30/19

(Access From repository.uma.ac.id)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR / SKRIPSI UMTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civis akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZEFANIA MANGIRING SILAEN
NPM : 158330117
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

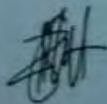
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty – Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Karo beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis – pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 27 September 2019

Yang menyatakan



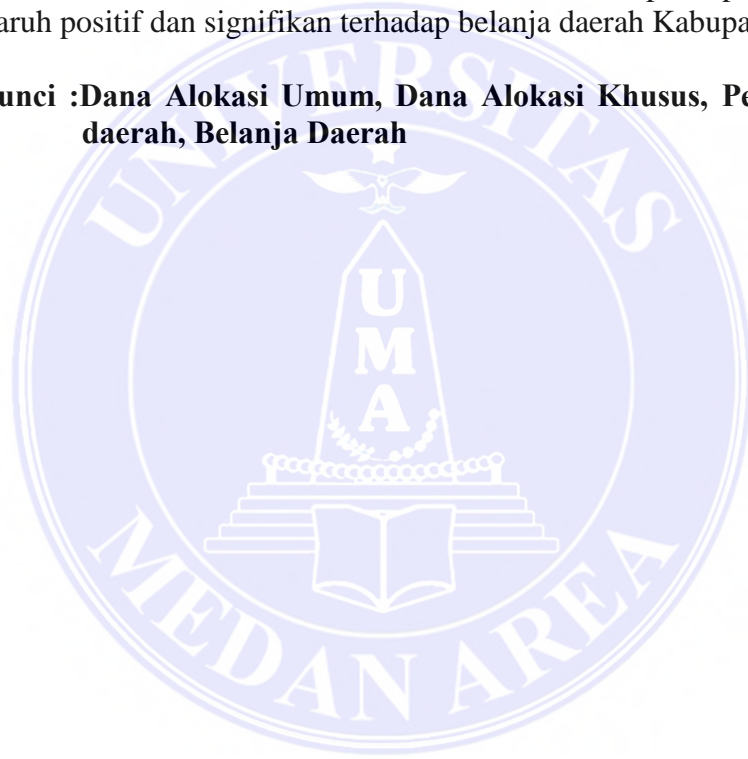
Zefania Mangiring Silaen

158330117

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Karo. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan kausal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan APBD yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS versi 21.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, untuk variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Karo dan secara simultan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Karo.

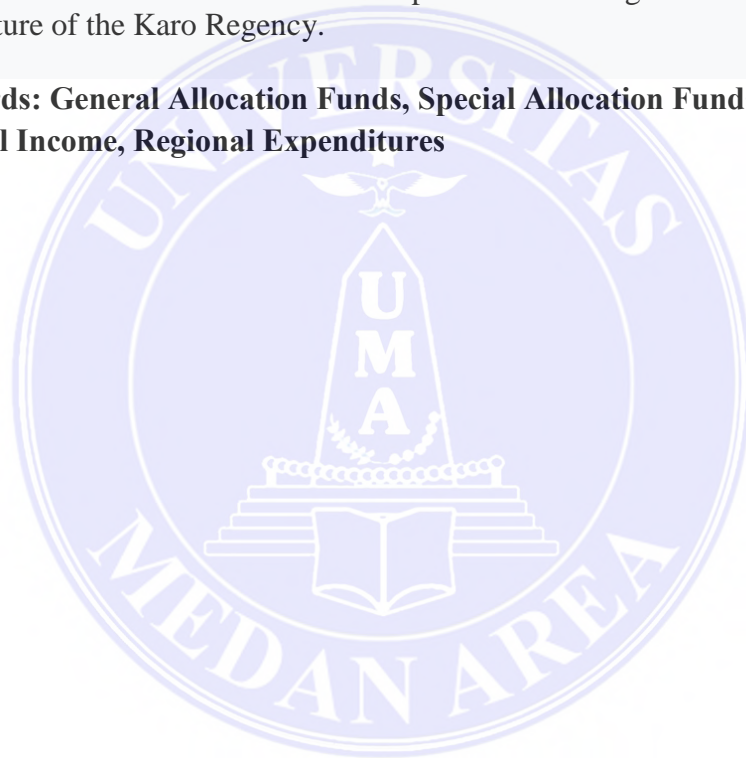
Kata Kunci :Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli daerah, Belanja Daerah



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of general allocation funds, special allocation funds and local original income of regional expenditure Karo Regency. The type of research used is quantitative with a causal approach. The type of data used is secondary data in the form of an APBD report obtained from the Revenue Service Office of the Regional Financial and Asset Management of Karo Regency. Data collection techniques with documentation with data analysis techniques using multiple linear regression with SPSS version 21.0. The results show that partially the general allocation fund and special allocation funds partially have a positive and significant effect on regional expenditures, for the regional original income variable it has a negative and significant effect on Karo District regional expenditure and simultaneously general allocation funds, special allocation funds and local revenue positive and significant effect on the expenditure of the Karo Regency.

Keywords: General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Original Income, Regional Expenditures



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari penelitian ini adalah **PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN KARO**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program strata (S-1) program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini ditemui beberapa kesulitan, namun dengan kerja keras, kesabaran, bantuan motivasi dan bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materi. Banyak pelajaran berharga yang menjadi inspirasi bagi penulis selama melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Peneliti belajar mengenai arti perjuangan dan yakin bahwa usaha yang sungguh-sungguh dengan iman percaya kepada Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang teristimewa orang tua tercinta Alm. AKP Posman Silaen dan Mian Anna Sepriana Hasibuan A.Md, serta kakak dan adik saya Desinta Utami Muliati Silaen A.Md, Sartika April Liza Silaen A.Md.keb, Maria Romaito Silaen S.Pd, Febryanti Friskila Silaen, Boyke Sianipar A. Md dan Rinaldi Barus SE.
2. Bapak Dadan Ramdan, M.Eng, MSc selaku Rektor Universitas Medan Area.

3. Bapak Dr Ikhsan Effendi, SE, Msi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, Msi, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Ibu Linda Lores, SE, Msi selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam skripsi ini, terima kasih atas masukan dan saran yang telah diberikan selama bimbingan.
6. Bapak Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, Msi, CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam skripsi ini, terima kasih atas masukan dan saran yang telah diberikan selama bimbingan.
7. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak, M.Acc selaku Dosen Sekretaris Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Universitas Medan Area atas bekal ilmu yang telah diberikan selama ini, serta memberikan motivasi kepada peneliti.
9. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo yang telah mengizinkan dan menerima peneliti untuk mengadakan penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan Julia Susanty, Arini Yuris dan Shahifah Nur Lubis yang selalu menemani dan meluangkan waktu serta memberikan semangat.

11. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih buat doa dan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan, maka dengan kerendahan hati dan dengan tangan terbuka Penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Medan, Juli 2019

Peneliti

Zefania Mangiring Silaen

NPM : 15.833.0117



DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
BAB IPENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB IITINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Belanja Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Dana Alokasi Umum	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Dana Alokasi Khusus.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.2 Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
2.4 Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IIIMETODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.

3.1.2	Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1.3	Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2	Populasi dan Sampel.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.1	Populasi.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2	Sampel.....	Error! Bookmark not defined.
3.3	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.1	Jenis Data	Error! Bookmark not defined.
3.4.2	Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.6	Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.6.1	Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
3.6.2	Analisis Regresi Linier Berganda....	Error! Bookmark not defined.
3.6.3	Uji Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1	Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Visi dan Misi Perusahaan.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Struktur Organisasi Perusahaan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.3	Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1	Uji Asumsi Klasik	Error! Bookmark not defined.
4.3.2	Analisis regresi linier berganda	Error! Bookmark not defined.

4.3.3	Uji Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
4.4	Pembahasan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VSIMPULAN DAN SARAN.....		51
5.1	Simpulan	51
5.2	Saran	51
Daftar Pustaka		Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	17
Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	19
Tabel 4.1 Laporan Realisasi APBD Kabupaten Karo 2013-2017.....	32
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	36
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas.....	37
Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas.....	38
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	39
Tabel 4.6 Analisis Regresi Linier Berganda.....	40
Tabel 4.7 Uji Parsial.....	42
Tabel 4.8 Uji Simultan.....	44
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan otomoni daerah Pemerintah daerah harus bisa membiayai kebutuhan daerah dengan anggaran yang sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD). Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan (PP No.58 Tahun 2005). Pengalokasian belanja daerah sangat bergantung pada pendapatan yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah baik itu dari sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun bantuan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Dana Bagi Hasil(DBH), dengan begitu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakatnya.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Karo masih tergolong sebagai daerah yang masih bergantung kepada Pemerintah pusat dalam hal belanja daerahdikarenakan pendapatan asli daerah di daerah tersebut masih lebih rendah dari kebutuhan belanja daerah di daerah tersebut. Berikut tabel dana alokasi

umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah Kabupaten Karo tahun 2013-2017:

Tabel 1.1

Jumlah DAU, DAK, PAD dan BD Kabupaten Karo tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	DAU	Rp 625.822.348.000	Rp 686.834.562.000	Rp 697.458.392.000	Rp 751.581.176.000	Rp 738.378.312.000
2	DAK	Rp 48.120.130.000	Rp 56.292.580.000	Rp 134.739.060.000	Rp 138.625.045.284	Rp 132.696.129.606
3	PAD	Rp 46.432.693.861	Rp 72.914.095.471	Rp 87.644.277.141	Rp 99.913.302.299	Rp 157.866.720.976
4	BD	Rp 901.675.564.724	Rp 889.667.378.450	Rp 1.182.781.103.093	Rp 1.305.806.829.818	Rp 1.240.853.942.695

sumber : *Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Karo.*

Berdasarkan tabel 1.1 belanja daerah untuk Kabupaten Karo masih bergantung pada dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dikarenakan pendapatan asli daerah di Kabupaten Karo masih lebih rendah dari kebutuhan belanja daerah di daerah tersebut. Dengan kata lain daerah Kabupaten Karo dapatdibilang daerah yang belum bisa mandiri, karena Pendapatan Asli Daerah di daerah tersebut belum bisa mendanai kebutuhan belanja daerahnya. Menurut Halim, 2007:232) kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Jumlah DAU secara keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk beberapa daerah yang memiliki PAD relatif kecil, jalannya roda pemerintahan bergantung pada tersediannya dana perimbangan (Bawono dan Novelsyah, 2012 : 16-17). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan guna memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat. Namun fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan/kontribusi PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Rihfenti Ernayani (2017), Joko Untung, Tri Widyastuti dan Suyanto(2017), Elisabeth(2018) mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,

Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah menghasilkan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Sementara itu pada penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Eko Adventino (2016) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Dari penelitian-penelitian yang sudah yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya terdapat ketidak konsistenan dari variabel yang mempengaruhi Belanja Daerah yang ditunjukkan dari hasil yang berbeda antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Hal ini yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo ?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Kabupaten Karo ?

4. Apakah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
- 4 Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan serta

kajian mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis dan Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris dan gambaran pada beberapa variabel mempengaruhi belanja daerah.

b. Bagi Universitas

Sebagai tambahan koleksi perpustakaan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang ada.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dan informasi tambahan agar penelitian selanjutnya dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1.1.1 Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut UU No. 33 tahun 2004, Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja Daerah (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Halim (2007:322) menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut Yuwono dkk, (2005:108) menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim,

2002). Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkanterkait secara langsung dengan program dan kegiatan.

Belanja Langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai,
2. Belanja Barang dan Jasa,
3. Belanja Modal

2. Belanja Tidak Langsung.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanjayang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai,
2. Belanja bunga,
3. Belanja subsidi,
4. Belanja hibah,
5. Belanja bantuan sosial,

6. Belanja bagi hasil kepadaprovinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa,
7. Bantuan keuangan,
8. Belanja tidak terduga.

1.1.2 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum adalah transfer dana bagi pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2007):

1. Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk daerah

Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.

3. Dana Alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

1.1.3 Dana Alokasi Khusus

Pengertian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang dimaksud kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Yuwono 2008:51).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

Alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah (Nurlan Darise, 2014: 137). Daerah-daerah yang menerima Dana Alokasi khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan yang mengatur kekhususan suatu daerah serta karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk dalam daerah ketahanan pangan. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis terkait dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana pada masing-masing bidang atau kegiatan yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus.

1.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos

penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber daya alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah sesuai UU No.33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Elita Dewi, dalam Maemunah 2006 yang membahas tentang identifikasi sumber pendapatan daerah, dijelaskan bahwa identifikasi adalah pengenalan atau pembuktian sama, jadi identifikasi sumber pendapatan asli daerah adalah meneliti, menentukan, dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (KesitBambang,2003).

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Kesit Bambang, 2003), mendapat balas jasa langsung. Retribusi dibagi atas tiga golongan:

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perizinan tertentu

3. Laba Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU. Sebagian laba daerah merupakan salahsatu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD. BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan dibidang lain, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan, dan lain-lain.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

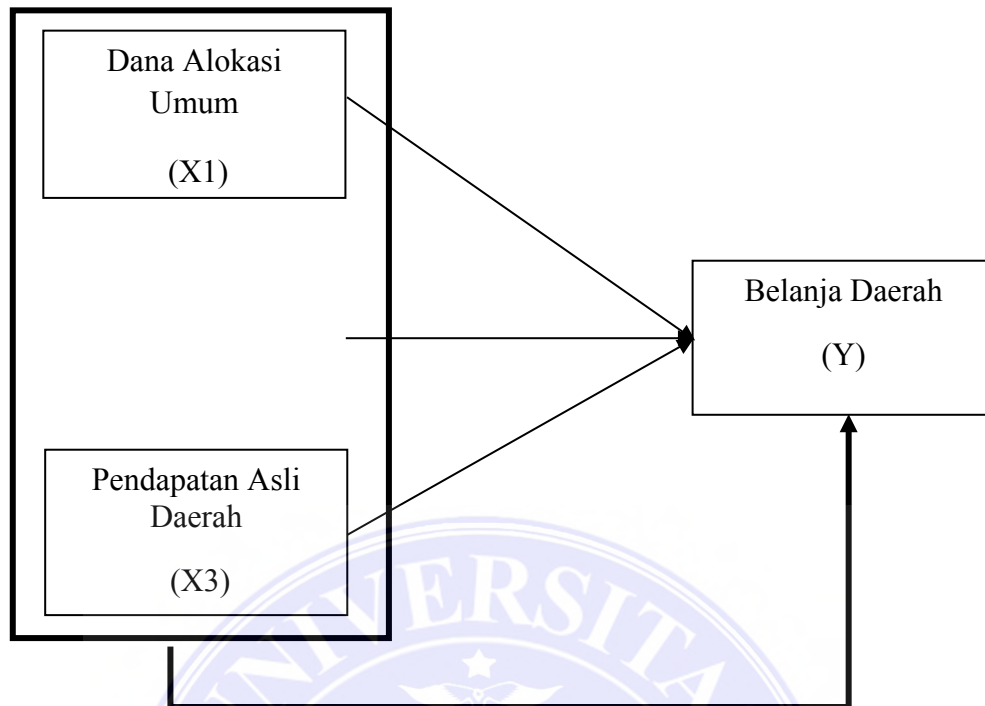
No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Rihfenti Ernayani (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013).	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
2	Joko Untung, Tri Widyastuti dan Suyanto (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2010-2014.	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
3	Elisabeth (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah serta Analisa Flypaper Effect Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

4	Yohanes Eko Adventino (2016)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan.
---	------------------------------	--	---

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti yang sudah dilakukan oleh Rihfenti Ernayani (2017), Joko Untung, Tri Widyastuti dan Suyanto (2017), Elisabeth (2018) dan Yohanes Eko Adventino (2016). Pada penelitian Rihfenti Ernayani dilakukan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009-2013, Joko Untung, Tri Widyastuti dan Suyanto (2017) dilakukan di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2014, Elisabeth (2018) dilakukan di Provinsi Jawa barat periode 2015-2016 dan Yohannes Eko Adventino (2016) dilakukan di Kota Balikpapan periode 2010-2015.

1.3 Kerangka Konseptual

Hubungan antar variabel yang akan diteliti tersebut dapat dijelaskan melalui suatu model yang disebut dengan paradigma penelitian atau model penelitian (Sugiyono, 2009: 63). Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka, maka dapat disusun model penelitian ini kedalam model penelitian seperti gambar berikut:



1.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009: 96) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan sementara penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis penelitian ini adalah :

H₁: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

H₂: Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

H₃: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

H₄: Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan pengaruh (sebab akibat), yaitu variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menguji pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

1.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang beralamat di Jalan Letjend Djamin Ginting, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia.

1.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 2019 sampai dengan September 2019.

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2019							
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt
1.	Pengajuan Judul Skripsi								
2.	Pembuatan Proposal								
3.	Bimbingan Proposal								

4.	Seminar Proposal							
5.	Pengumpulan data dan analisis data							
6.	Penyusunan dan bimbingan Skripsi							
7.	Seminar Hasil							
8.	Sidang Meja Hijau							

1.2 Populasi dan Sampel

1.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data mengenai Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

1.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (Sugiyono, 2011).

Sampel penelitian ini adalah data kedinasan mengenai Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

1.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variable di ukur , sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat). (Sugiyono, 2016:39).Variabel bebas yang diteliti adalah Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3).

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2016:39).Dalam penelitian ini variabel terikat adalah Belanja Daerah (Y).

Tabel 3.2

No	Variabel	Defenisi Variabel	Skala
1	Dana Alokasi Umum	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka	Nominal

		pelaksanaan desentralisasi.	
2	Dana Alokasi Khusus	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.	Nomial
3	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Nominal
4	Belanja Daerah	Semua pengeluaran kas daerah dalam periode	Nominal

		tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.	
--	--	--	--

1.4 Jenis dan Sumber Data

1.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu merupakan data yang berupa angka yang mengenai dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari berbagai sumber buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian. Untuk sumber data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD yang didapat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka menggunakan prosedur pengumpulan data sekunder sehingga teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi yang diinterpolasi dari data tahunan menjadi perbulan dengan memakai *software EVIEWS 7*. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto Suharsimi, 2002:206).

1.6 Teknik Analisis Data

1.6.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah populasi data mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah distribusi data dapat dikatakan normal atau tidak salah satunya menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (KS), melihat angka probabilitas dengan ketentuan probabilitas < 0.05 maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sedangkan probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima (Siregar Sofryan, 2012:153).

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2013:105) menyatakan untuk mendeteksi dan atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini meneginsikasikn adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas.

Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih dri independen.

Multikolinearitas juga dapat dilihat dari:

- a. *Tolerance valued* lawannya
- b. *Variance Inflation Faktor* (VIF)

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya,. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$).

Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. *Tolerance value* $< 0,10$ atau $VIF > 10$: terjadi multikolinearitas.
- b. *Tolerance value* $> 0,10$ atau $VIF < 10$: tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013:142) salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk mereges nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil probabilitas signifikan jika nilai signifikansinya diatas kepercayaan 5%.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Suharyadi, 2008:23).

Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*, hasil

dari uji *Durbin-Watson* harus menunjukkan terbebas dari autokorelasi untuk menunjukkan terbebas dari autokorelasi untuk memenuhi syarat terbebas dari uji asumsi klasik. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Jika $d > d_L$ maka terdapat autokorelasi.
- b. Jika $d < d_U$ maka tidak terdapat autokorelasi positif.
- c. Jika $d_L = d = d_U$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.
- d. Jika $d > (4 - d_L)$ maka terdapat autokorelasi.
- e. Jika $(4 - d_U) > d$ maka tidak terdapat autokorelasi negatif.
- f. Jika $(4 - d_U) = d = (4 - d_L)$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

1.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (X1) Dana Alokasi Khusus (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (X3) terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah (Y). Menurut Sugiyono (2011:277) adalah berikut :” Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”. Model analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

$$Y = \text{Belanja Daerah}$$

- X_1 = Dana Alokasi Umum
- X_2 = Dana Alokasi Khusus
- X_3 = Pendapatan Asli Daerah
- a = Konstanta
- $b_1 b_2 b_3$ = Koefisien regresi untuk variabel
- e = faktor pengganggu atau standar eror

1.6.3 Uji Hipotesis

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data diatas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam tabel dan angka metode statistik sebagai berikut :

1. Uji Statistik t (Parsial)

Pengujian Parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria dalam penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig < alpha (0,05) dan searah dengan hipotesis maka hipotesis diterima.
- b. Jika nilai sig > alpha (0,05) dan tidak searah dengan hipotesis maka hipotesis ditolak.

Selain itu uji parsial ini bisa dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. H_0 ditolak dan H_a diterima jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$
- b. H_0 diterima dan H_a ditolak jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$

2. Uji F (Simultan)

Uji nilai F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikan. Jika nilai $\text{sig} < 0,005$ maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan prosedur penelitian sebagai berikut:

- a. $H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$, artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. $H_1 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$, artinya bahwa ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- c. Level of signifikan = 5% (0,05).
- d. Menentukan nilai Fhitung =

$$F_h = \frac{\frac{R^2}{K-1}}{\frac{1-R^2}{N-K}}$$

Keterangan:

R : koefisien korelasi ganda.

F_h : F hitung.

K : jumlah variabel bebas.

N : jumlah sampel yang dipakai.

e. Kriteria Pengujian:

- a. Jika tingkat signifikan (P-Value) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak ($\alpha = 0,05$).

- b. Jika tingkat signifikansi (P-Value) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima ($\alpha = 0,05$).

3. Uji Koefisien Determinasi

Ukuran statistik yang dapat menggambarkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain adalah koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Koefisien determinasi diberi simbol (r^2) dan koefisien korelasi diberi simbol r . Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel.

Koefisien determinasi (r^2) dari hasil regresi sederhana menunjukkan tingkat kejelasan yang dapat diberikan oleh model tersebut terhadap perubahan variabel dependen. Secara umum nilai r^2 terletak pada nilai 0 sampai dengan 1 ($0 < r^2 < 1$). Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan.

Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi (r^2) suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya, semakin mendekati satu besarnya koefisien determinasi (r^2) suatu persamaan regresi, semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen.

Tabel 4.6
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,168	1,450		2,184	,033
1 Dana Alokasi Umum	,490	,155	,198	3,168	,002
Dana Alokasi Khusus	,322	,016	,946	20,262	,000
Pendapatan asli Daerah	-,069	,024	-,172	-2,871	,006

Sumber : Hasil pengelolaan data SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, maka persamaan regresi linear berganda sebagai berikut

$$Y = 3,168 + 0,490X_1 + 0,322X_2 + (-0,069) + e$$

Dimana

Y = Belanja Daerah

X₁ = Dana Alokasi Umum

X₂ = Dana Alokasi Khusus

X₃ = Pendapatan Asli Daerah

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 3,168 menyatakan bahwa jika nilai Dana Alokasi Umum (X₁), Dana Alokasi Khusus (X₂) dan Pendapatan Asli Daerah (X₃) dianggap konstan atau bernilai 0, maka Belanja Daerah (Y) sebesar 3,168.
- b. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (X₁) sebesar 0,490 menunjukkan apabila Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan 1%, maka

Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,490%.

- c. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (X_2) sebesar 0,322 artinya menunjukkan apabila Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan 1% maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,322 %.
- d. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_3) sebesar -0,069 artinya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan belanja daerah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Daerah akan turun sebesar -0,069.

1.3.3 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (t)

Menurut Ghozali (2013:98) uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria dalam penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig < alpha (0,05) dan searah dengan hipotesis maka hipotesis ditolak.
- b. Jika nilai sig > alpha (0,05) dan tidak searah dengan hipotesis maka hipotesis diterima.

Selain itu uji parsial ini bisa dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. H_0 ditolak dan H_a diterima jika t hitung > t tabel untuk $\alpha = 5\%$
- b. H_0 diterima dan H_a ditolak jika t hitung < t tabel untuk $\alpha = 5\%$

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,168	1,450		2,184	,033
1 Dana Alokasi Umum	,490	,155	,198	3,168	,002
Dana Alokasi Khusus	,322	,016	,946	20,262	,000
Pendapatan asli Daerah	-,069	,024	-,172	-2,871	,006

Sumber : Hasil pengelolaan data SPSS, 2019

Untuk Kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 5\%$ dengan nilai t tabel untuk ($df = n - k - 1 = 60 - 3 - 1 = 56$). ($\alpha/3 = 0,05/3 = 0,01$) adalah 2,394. Dimana $df =$ degree of freedom atau derajat bebas dan $n =$ jumlah data dan $k =$ jumlah variabel independen.

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Aloksi Umum Terhadap Belanja Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap Belanja Daerah, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

$$(t_{hitung}) = 3,168$$

$$(t_{tabel}) = 2,394$$

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah diperoleh $t_{hitung \text{ dana alokasi umum}} > t_{tabel}$ ($3,168 > 2,394$) dan signifikan sebesar $0,002 < 0,05$. Maka dapat

disimpulkan secara parsial variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sesuai dengan hipotesis H₁.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dana alokasi khusus secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap belanja daerah, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

$$(t_{hitung}) = 20,262$$

$$(t_{tabel}) = 2,394$$

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah diperoleh $t_{hitung} \text{ dana alokasi khusus} > t_{tabel}$ ($20,262 > 2,394$) dan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan secara parsial variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sesuai dengan hipotesis H₂.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap belanja daerah, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

$$(t_{hitung}) = -2,871$$

$$(t_{tabel}) = 2,394$$

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah diperoleh $t_{hitung} \text{ pendapatan asli daerah} > t_{tabel}$ ($-2,871 > 2,394$) dan signifikan sebesar $0,006 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan secara parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah sesuai dengan hipotesis H₃.

2. Uji Simultan atau F

Menurut Ghozali (2013:98) uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikan. Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dengan prosedur penelitian sebagai berikut:

- a. $H_0 : b_1 = b_2 = 0$, artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. $H_1 : b_1 \neq b_2 \neq 0$, artinya bahwa ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Simultan

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,308	3	,103	373,771	,000 ^b
Residual	,015	56	,000		
Total	,324	59			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

Sumber : Hasil pengelolaan data SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 373,771. Sedangkan F_{tabel} Dengan kriteria uji f dilakukan pada tingkat $\alpha = 5\%$ dengan nilai F_{tabel} ($N_1 = k - 1 = 2$; $N_2 = n - k = 60 - 3 = 57$) adalah 3,16. Dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pengujian secara bersama-sama pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($373,771 > 3,16$) dan signifikan $0,000 < 0,05$. Maka disimpulkan bahwa secara simultan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara bersama sama berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.

3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 4.9

Koefisien Determinasi (Uji R square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,976 ^a	,952	,950	,01658

Sumber : Hasil pengelolaan data SPSS, 2019

Berdasarkan hasil pada tabel 4.9 model regresi diperoleh sebesar 0.952 atau 95,2%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2) dan Pendapatan Asli Daerah (X3) terhadap Belanja Daerah (Y) sebesar 95,2%. Sisanya sebesar 4,8% ($100\% - 95,2\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

1.4 Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,168 > 2,394$) dan signifikan sebesar $0,002 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan secara parsial variabel dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sesuai dengan hipotesis H_1 . Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (X_1) sebesar $0,490$ menunjukkan apabila Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan 1% , maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar $0,490\%$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rihfenti Ernayani (2017), Joko Untung, Tri Widyastuti dan Suyanto (2017) dan Elisabeth (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Pada penelitian saya menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dalam hal belanja daerah karena sumber belanja daerah masih lebih besar dari dana bantuan pemerintah pusat berupa dana alokasi umum. Dikarenakan Kabupaten Karo masih sangat membutuhkan perhatian dari Pemerintah Pusat untuk membangun dan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar dapat memaksimalkan potensi daerah untuk pembiayaan kebutuhan daerah. Dana alokasi umum digunakan sebagian besar untuk belanja pegawai negeri sipil yang merupakan suatu keharusan daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia. Dana alokasi umum digunakan juga untuk belanja modal yang berguna untuk menambah aset

tetap/inventaris yang memeberikan manfaat jangkapanjang agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dan dapat memberikan lapangan pekerjaan.Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Karo harus lebih baik lagi menggunakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat berupa dana alokasi umum agar Pemerintah Daerah bisa membangun dan meningkatkan daerah lebih baik lagi dan dapat menjadi daerah yang mandiri.

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah diperoleh $t_{hitung} \text{ dana alokasi khusus} > t_{tabel}$ ($20,262 > 2,394$) dan signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan secara parsial variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sesuai dengan hipotesis H₂. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (X₂) sebesar 0,322 artinya menunjukkan apabila Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan 1% maka Belanja Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,322 %.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rihfenti Ernayani (2017), Joko Untung, Tri Widyastuti dan Suyanto (2017) dan Elisabeth (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Pada penelitian saya bahwa dana alokasi khusus sudah memenuhi segala kegiatan khusus yang ada di kabupaten karo. Fungsi dana alokasi khusus pada Kabupaten Karo yaitu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tertentu dan sesuai prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang merupakan tugas pemerintahan di bidang tertentu. Kegiatan khusus yang menjadi prioritas di Kabupaten Karo yaitu

pembangunan yang menyangkut infrastruktur maupu sarana prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat , antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan dan perlindungan sosial. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih baik lagi dalam kegiatan-kegiatan khusus yang dibuat agar dapat memberikan kesejahteraan untuk daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Karo.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2,871 > 2,394$) dan signifikan sebesar $0,006 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan secara parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah sesuai dengan hipotesis H_3 .

Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X_3) sebesar $-0,069$ artinya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan belanja daerah. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Daerah akan turun sebesar $-0,069$.

Hasil penelitian ini tidak sejalan Rihfenti Ernayani (2017), Joko Untung, Tri Widyastuti dan Suyanto (2017), Elisabeth (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dan Yohanes Eko Adventino (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap

belanja daerah. Pada penelitian saya menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah. Pendapatan asli daerah masih relatif kecil untuk membiayai belanja daerah kabupaten karo sehingga daerah kabupaten karo masih tergolong daerah yang belum mandiri karena masih membutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat untuk belanja daerah di kabupaten karo. Pendapatan asli daerah di Kabupaten Karo masih lebih rendah dikarenakan di daerah Kabupaten Karo sering terjadi bencana alam untuk beberapa tahun terakhir salah satunya yaitu erupsi Gunung Sinabung yang berdampak pada perekonomian Kabupaten Karo. Banyak wisatawan yang tidak berminat lagi untuk berwisata ke Kabupaten Karo karena takut akan bencana alam tersebut dan banyak juga masyarakat yang menjadi pengangguran karena peristiwa tersebut.

4. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara bersama-sama pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah diperoleh $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($373,771 > 3,16$) dan signifikan $0,000 < 0,05$. Maka disimpulkan bahwa secara simultan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara bersamasama berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Rihfenti Ernayani (2017), Joko Untung, Tri Widyastuti dan Suyanto (2017) dan Elisabeth (2018) yang menyatakan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli

daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo sudah dapat membiayai belanja daerah di kabupaten karo.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

2.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
2. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
3. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah.
4. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

2.2 Saran

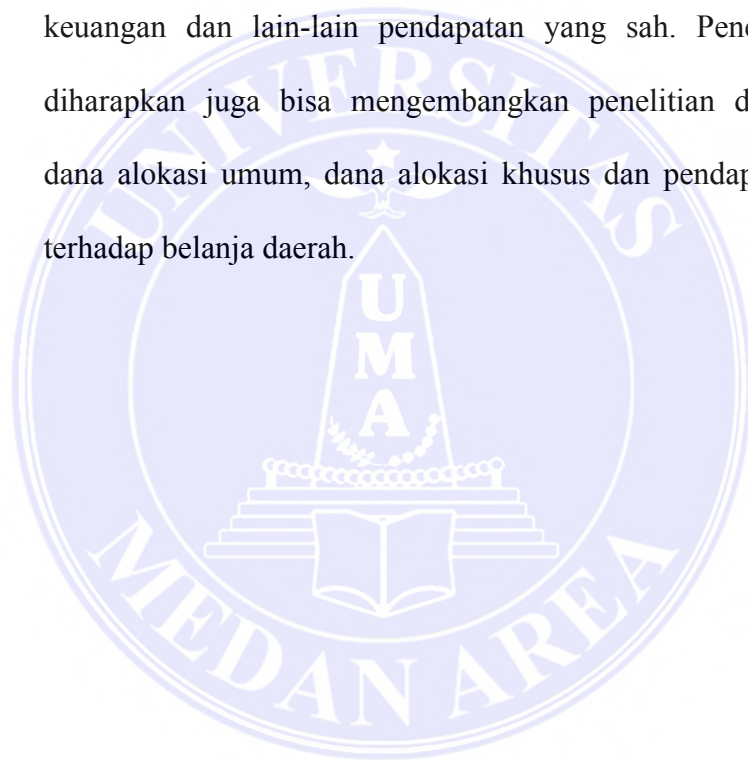
1. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo

Sebaiknya pemerintah daerah lebih mengembangkan tempat-tempat wisata yang ada di daerah Kabupaten Karo dan mengembangkan produksi daerah terutama di bidang pertanian agar dapat menambah pendapatan asli daerah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau pedoman bagi yang ingin melakukan penelitian terkait pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah

memiliki pengaruh sebesar 95.2% terhadap belanja daerah pada Kabupaten Karo, maka dapat diketahui bahwa masih terdapat 4.8% pengaruh dari variabel lain terhadap belanja daerah yang tidak diungkap dalam penelitian ini dan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti dana bagi hasil, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi khusus non fisik, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, bantuan keuangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Peneliti selanjutnya diharapkan juga bisa mengembangkan penelitian dengan meneliti dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.



LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.* (2002).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* (2004).
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2005).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.* (2005).
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.* (2006).
- Adventino, Y. E. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Daerah di Kota Balikpapan.
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2012). *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD dan SKPKD.* Jakarta: Salemba Empat.
- Darise, N. (2014). *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: PT. Indeks.
- Elisabeth. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.
- Kesit, B. (2003). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Yogyakarta: UII.

- Maemunah. (2006). *Flyppaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Padang: Simposium Nasional Akuntansi.
- Siregar, S. (2012). *Statistik Parametrik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2002). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharyadi. (2008). *Statistik Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 2 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. (n.d.).
- Untung, J., Widyastuti, T., & Suyanto. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2010-2014.
- Yuwono, S. (2008). *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yuwono, S., Indrajaya, A., & Hariyandi. (2005). *Penganggaran Sektor Publik*. Surabaya: Bayumedia Publishing.

LAMPIRAN

